

TESIS

PERBUDAKAN MODERN DALAM PERSPEKTIF GEOGRAFI POLITIK : STUDI KASUS PERBUDAKAN ANAK BUAH KAPAL DI DESA BENJINA KABUPATEN KEPULAUAN ARU MALUKU

**Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Master
pada Jurusan Magister Ilmu Hubungan Internasional
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



PEMBIMBING TESIS

Dr. SURWANDONO, S.Sos., M.Si.

**MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PERBUDAKAN MODERN DALAM PERSPEKTIF GEOGRAFI
POLITIK : STUDI KASUS PERBUDAKAN ANAK BUAH KAPAL DI
DESA BENJINA KABUPATEN KEPULAUAN ARU MALUKU

Disusun oleh:

ANASTAZIA N WATTIMENA

(20171060002)

Telah di pertahankan dalam Ujian Tesis, dinyatakan lulus dan
disahkan dihadapan Tim Penguji Jurusan Magister Ilmu
Hubungan Internasional Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 1 Oktober 2019

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Study Hall MIHI



Prof. Dr. Bambang Cipto

Penguji I

Ali Maksum, Ph.D.

Penguji II

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di perguruan tinggi lain.

Dalam tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Oktober 2019


Anastazia N Wattimena

KATA PENGANTAR



Studi Hubungan Internasional dalam perkembangannya tidak hanya membahas mengenai studi keamanan tradisional misalnya perang. Studi keamanan meluas hingga menyentuh isu-isu kemanusiaan yang kemudian Tidak berhenti sampai di sana, studi HI juga menggandeng kajian dari studi lain, misalnya geografi hingga dalam studi hubungan internasional, dikenal perspektif geografi politik yang mana merupakan penggabungan antara unsur-unsur geografi yang menyentuh sendi politik.

Dengan mempertimbangkan pentingnya kajian tentang isu kemanusiaan serta kontribusi perspektif geografi politik untuk memperkaya kajian hubungan internasional, maka penulis memilih memfokuskan tesis ini pada kajian perbudakan modern yang ditinjau dalam perspektif geografi politik. Penelitian ini mengkaji alasan dibalik terjadinya perbudakan modern yang dilakukan oleh perusahaan ikan asal Thailand kepada ABK yang berasal dari Myanmar, Kamboja, dan Laos, di desa Benjina, Kepulauan Aru-Maluku. Akhirnya, penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat secara bagi seluruh pembaca.

Yogyakarta, 24 September 2019

Anastazia N Wattimena

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Kontribusi Riset.....	8
1.5 Studi Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Teori.....	20
1.7 Hipotesa.....	41
1.8 Metodologi Penelitian.....	41
1.9 Jenis Penelitian.....	43
1.10 Jangkauan Penelitian.....	43
1.11 Sistematika Penulisan.....	45
BAB II PERBUDAKAN MODERN DI DESA BENJINA KEPULAUAN ARU DAN POSISI INDONESIA DALAM ISU <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	48

2.1	Istilah Perdagangan Orang dan Perbudakan Modern.. ...	48
2.2	Perdagangan Orang dan Perbudakan dalam Industri Perikanan	60
2.3	Profil Geografis Lokasi Perbudakan	62
2.4	Keberadaan PT. Pusaka Benjina Resources.....	70
2.5	Perbudakan Modern di Benjina	75
2.6	Konvensi Internasional yang Mengatur Perdagangan Orang dan Perbudakan.....	90
BAB III Kebijakan Keamanan Maritim Negara, serta Pertimbangan Juridis Indonesia Terkait Perdagangan Orang dan Perbudakan.....		
3.1	Perspektif Geografi Politik.....	97
3.2	Wawasan Nusantara Indonesia	100
3.3	Indonesia sebagai Negara Maritim	104
3.4	Posisi Strategis Indonesia	108
3.5	Hukum Indonesia yang Mengatur Perdagangan Orang ..	109
3.6	Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia	112
3.7	Komitmen ASEAN dalam Memerangi Perdagangan Orang dan Perbudakan pada Perairan Kawasan	88
BAB IV PENYEBAB GEOGRAFIS MUNCULNYA PRAKTEK PERBUDAKAN DI DESA BENJINA DAN KELEMAHAN KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH DALAM MENGAMANKAN LOKASI PULAU YANG TERISOLIR		
4.1	Keterisolasian Desa Benjina yang Menjadi Faktor Pertumbuhan Perbudakan	134
4.2	Kelemahan Kebijakan Politik Pemerintah di Pulau-Pulau Terisolir.....	153
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fase Perkembangan Pemikiran Geografi Politik..	22
Gambar 2.1 Persebaran Kasus Perbudakan Modern di Berbagai Negara Tahun 2014..	58
Gambar 2.2 Peta Indonesia.....	62
Gambar 2.3 Peta Kepulauan Aru.....	63
Gambar 2.4 Tabel Potensi Perikanan Tangkap Per Provinsi Per Ton Tahun 2015.....	65
Gambar 2.5 Peta Kekayaan Maritim Perairan Provinsi Maluku	68
Gambar 2.6 Kondisi Kerja.....	82
Gambar 2.7 Kawasan Makam ABK Asing di Benjina.....	83
Gambar 2.8 Metode Kontrol Pekerja oleh Perusahaan	84
Gambar 2.9 Bentuk Kekerasan yang Dialami Para Pekerja .	85
Gambar 2.10 ABK Asing yang Sedang Dikurung	88
Gambar 2.11 ABK Asing Dikurung Karena Hendak Melarikan Diri.....	89
Gambar 3.1 Bagan Keamanan Maritim.....	98
Gambar 3.2 Rencana Kebijakan Kelautan Indonesia.....	117
Gambar 3.3 Peta Perbatasan Laut Indonesia	122
Gambar 3.4 Tingkat Penanganan Tindak Perdagangan Orang Negara Asia Tenggara .	131
Gambar 4.1 Negara-Negara yang Terlibat dalam Kasus Perbudakan ABK di Benjina .	138
Gambar 4.2 Tampilan Lokasi PT. PBR di Pulau Maikoor .	142

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Posisi Penelitian	16
-----------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ABK	:	Anak Buah Kapal
AP	:	Associated Press
ASEAN	:	Association of South East Asian Nations
BAKAMLA	:	Badan Keamanan Laut
BBB	:	Bahan Beracun dan Berbahaya
BMKT	:	Benda Muatan Kapal Tenggelam
COMTRADE	:	Commodity and Trade
CSR	:	Corporate Social Responsibility
Dll	:	Dan lain-lain
Et.al	:	et alii
GBHN	:	Garis Besar Haluan Negara
GT	:	Gross Ton
GT PP-TPPO	:	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
GSI	:	Geological Strength Index
IMO	:	International Maritime Organization
Interpol	:	International Police
IOM	:	International Organization of Migration
IPS	:	Ilmu Pengetahuan Sosial
IUU	:	Illegal Unreported Unregulated
KADIN	:	Kamar Dagang dan Industri
Kemen PPPA	:	Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
KIARA	:	Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KKL	: Kebijakan Kelautan
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
LBB	: Liga Bangsa-Bangsa
MCS	: Monitor, Control, Surveillance
MNC	: Multi National Corporation
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PSDKP	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PT	: Perseroan Terbatas
SAW	: Sallallahu Alaihi Wassalam
SLO	: Surat Layak Operasi
TAP	: Ketetapan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNCLOS	: United Nations Convention on Law of the Sea
UU	: Undang-Undang
WN	: Wawasan Nusantara
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kasus perbudakan terjadi di desa Benjina Kabupaten Kepulauan Aru Maluku yang kemudian terbongkar di tahun 2015 serta mengevaluasi kebijakan pengamanan maritim yang diambil pemerintah Indonesia yang belum optimal sehingga praktek perbudakan kemudian dapat tumbuh dan berkembang.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber-sumber terpercaya baik cetak maupun elektronik. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya perbudakan modern di Benjina, penulis menggunakan perspektif geografi politik, dan konsep tata kelola negara kepulauan.

Kata Kunci : Perbudakan, Benjina, Geografi, Politik, Kebijakan, Kepulauan

ABSTRACT

This research aims to analyze why modern slavery happened in Benjina Kabupaten Kepulauan Aru Maluku. International News Agency *Associated Press* successfully disclosed the case in 2015. This research also evaluates the security policy of Indonesian government to protect its maritime zone.

This research used secondary data, and to analyze the whole things this research used political geography perspective, as well as the concept of archipelagic state.

Keywords : Slavery, Benjina, Political, Geography, Policy, Archipelagic